

# EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Ikazanti Udyana  
NPP.32.0928

*Asdaf Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara*  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah  
Email : [ikazanti@gmail.com](mailto:ikazanti@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Ismail, S.Pd.I., M.Si.

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP) :** Poverty is a complex problem that is still a major challenge in Indonesia, especially in remote areas such as East Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province. One of the government's efforts to overcome these problems is through a conditional assistance program called the Family Hope Program (PKH). **Objective:** This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of PKH in reducing poverty rates in East Kolaka Regency. **Method :** This study uses a qualitative descriptive method through interviews, observations, and documentation. The analysis of program effectiveness was carried out using the theory according to Aswar Annas (2017) which includes seven indicators, namely timeliness, human resources for program management, work mechanisms, cooperation and communication, accuracy of fund distribution, analysis of deviations, and monitoring and evaluation. **Results/Findings :** The results of the study show that the implementation of PKH has been effective in reducing poverty rates in East Kolaka Regency through assistance aimed at helping poor people achieve social welfare. However, this program still has obstacles that need to be followed up. **Conclusion :** The implementation of the Family Hope Program in East Kolaka Regency has been running effectively. Based on the findings of this study, it is recommended that the East Kolaka Regency Social Service use technology in data collection, encourage transparency and accountability in fund distribution, and carry out economic empowerment and improve skills PKH recipients.

**Keywords :** Poverty, Family Hope Program (PKH), Effectiveness, Social Assistance, East Kolaka

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang masih menjadi tantangan utama di Indonesia, khususnya di daerah terpencil seperti Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui program bantuan bersyarat yang disebut dengan Program Keluarga Harapan (PKH). **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan PKH dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis efektivitas program dilakukan dengan

menggunakan teori menurut Aswar Annas (2017) yang mencakup tujuh indikator yaitu ketepatan waktu, sumber daya manusia pengelola program, mekanisme kerja, kerjasama dan komunikasi, ketepatan penyaluran dana, analisis penyimpangan, serta monitoring dan evaluasi. **Hasil/Temuan** : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH telah efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur melalui pendampingan yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin mencapai kesejahteraan sosial. Namun, program ini masih terdapat hambatan yang perlu ditindaklanjuti. **Kesimpulan** : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kolaka Timur telah berjalan efektif. Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur untuk menggunakan teknologi dalam pendataan, mendorong transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana, serta melakukan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan penerima PKH

**Kata Kunci** : Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH), Efektivitas, Bantuan Sosial, Kolaka Timur

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengurangan dan pemberantasan kemiskinan global merupakan tujuan utama agenda pembangunan global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan pengurangan kemiskinan telah menjadi salah satu indikator terpenting dalam pembangunan melalui target *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada tahun 2030 (Moatsos & Lazopoulos, 2021). Kemiskinan adalah kondisi dimana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka secara layak, yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Suryawati, 2004). Masyarakat miskin lebih rentan terhadap kejadian yang tidak dapat mereka kendalikan, mereka kurang mampu mendiversifikasi sumber pendapatan, dan lebih mungkin menderita kelaparan, kekerasan, dan bencana alam, mereka memiliki akses yang lebih rendah ke pasar kredit dan asuransi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, serta anak-anak mereka berisiko dieksploitasi, dan cenderung tidak mengenyam pendidikan (Azariadis & Stachurski, n.d.).

Terjadinya *Pandemi Covid-19* pada tahun 2019 memperburuk kemiskinan global yang mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaan, kemunduran ekonomi, dan meningkatnya kerentanan masyarakat mengalami kondisi kemiskinan yang berimplikasi lahirnya banyak kebijakan dalam rentang waktu yang cepat dan singkat yang dikenal dengan proliferasi kebijakan (Diana Meilinda & Cahyani, n.d.). Pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan mikro untuk masyarakat miskin mungkin dapat memberikan gambaran mengenai sektor keuangan aspek kemiskinan, namun tidak mencerminkan dimensi budaya, sosial, dan psikologisnya, meskipun pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat miskin, pertumbuhan ekonomi tidak serta merta membantu orang miskin dengan hanya berpihak pada kelompok masyarakat yang tidak miskin dan memiliki hak istimewa (Singh & Chudasama, 2020).

Kekhawatiran pertama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam upaya mereka untuk mengurangi kemiskinan adalah kurangnya pertumbuhan ekonomi yang memadai, hal ini dapat dibenarkan karena tidak ada pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan telah terjadi tanpa adanya pertumbuhan produksi yang berkelanjutan, namun besarnya pertumbuhan ekonomi tampaknya tidak cukup menjadi syarat untuk mencapai pertumbuhan yang mendalam pengentasan kemiskinan (Loayza & Raddatz, 2006). Tantangan

baru muncul bagi negara Indonesia dalam menekan angka kemiskinan selama beberapa dekade terakhir yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan sebesar 24% pada tahun 1999 menjadi 9,8% pada tahun 2020, laju rata-rata penurunan tersebut turun dari 1,9% antara tahun 1970-an dan 1990-an menjadi hanya 0,5% antara tahun 2002 dan 2017 yang menunjukkan bahwa kondisi ini dapat memperburuk kondisi ekonomi oleh meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat (Purwono et al., 2021). Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi hingga saat ini dengan populasi yang besar dan beragam, kesenjangan sosial serta ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan masih menjadi faktor utama yang memicu kemiskinan. Dalam menanggulangi masalah kemiskinan ini, pemerintah berupaya mengatasinya melalui program bantuan sosial yang diberikan secara langsung kepada masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan.

Pemerintah pada tahun 2007 memperkenalkan program yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu dengan ketentuan syarat yang berlaku untuk mendidik masyarakat agar mempergunakan bantuan sosial sesuai dengan peruntukannya, dan tidak menyimpang dari tujuan pemberian bantuan tersebut. Pada tingkat internasional PKH dikenal dengan sebutan *Conditional Cash Transfer (CCT) Program* yaitu sebagai sarana untuk mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan dengan memberlakukan ketentuan sebagai persyaratan atau tanggung jawab bersama antara penerima manfaat dan program bantuan tunai bersyarat, ketentuan tersebut memaksa beberapa perilaku yang bermanfaat baik dalam pendidikan maupun kesehatan bagi rumah tangga miskin (Rukiko et al., 2023). Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan tentunya dibutuhkan identifikasi terkait pelaksanaan program untuk menilai dampak jangka panjang program ini terhadap penerima manfaat dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 hingga tahun 2024 berdasarkan data BPS Sulawesi Tenggara menjadi urutan ke-enam dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Sulawesi Tenggara, sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka Timur berada pada urutan ke-delapan terbanyak di Sulawesi Tenggara. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan antara jumlah penduduk dan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur terhadap daerah lain yang ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tenggara**  
**Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa) Tahun 2022-2024**

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)		
	2022	2023	2024
Konawe Selatan	35,79	36,84	37,09
Konawe	32,09	33,09	33,99
Kolaka	31,56	32,96	33,2
Muna	30,48	32,24	31,82
Kolaka Utara	20,63	21,79	22,07

(1)	(2)	(3)	(4)
Kolaka Timur	19,33	20,41	20,33
Bombana	19,21	20,52	20,56
Kendari	18,72	19,24	18,2
Wakatobi	15,01	15,35	14,93
Buton Tengah	13,92	14,46	13,52
Buton	13,61	14,15	14,41
Bau-bau	12,69	13,29	13,25
Buton Selatan	11,57	11,88	11,5
Muna Barat	11,56	11,81	11,36
Buton Utara	9,13	9,09	9,18
Konawe Utara	9,02	9,01	8,94
Konawe Kepulauan	5,47	5,44	5,36
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>309,79</b>	<b>321,53</b>	<b>319,71</b>

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara

Mayoritas penduduk Kabupaten Kolaka Timur bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan. Namun, produktivitas pertanian yang rendah, kurangnya akses terhadap teknologi moderen, serta *fluktuasi* harga komoditas pertanian sering kali mempengaruhi pendapatan masyarakat. Dengan pendapatan yang tidak tetap, maka kebutuhan hidup masyarakat tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk yang berada di wilayah perdesaan membutuhkan perhatian secara khusus oleh pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan daerah.

Kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur termasuk dalam tingkat kemiskinan ekstrem berdasarkan “Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 100.3.3.2/426/Tahun 2023 tentang Revisi Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023” yang berupaya untuk menghapus 508 jumlah masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2023. Pada tahun 2024, Kabupaten Kolaka Timur menargetkan untuk bebas dari kemiskinan ekstrem dengan membuka ruang seluas-luasnya untuk menangani masalah kemiskinan. Penduduk miskin di Kabupaten Kolaka Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami perubahan yang tidak konsisten, yaitu mengacu pada data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka Timur yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami kenaikan akibat *Pandemi Covid-19*, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga 2022, dan kembali naik pada tahun 2023 pada gambar berikut.



**Gambar 1**

**Grafik Kemiskinan di Kolaka Timur Tahun 2019-2023**

*Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka Tahun 2024 oleh BPS Kabupaten Kolaka Timur*

Menurut Muhadam Labolo (2017) pada hakekatnya fungsi dasar dari suatu pemerintahan adalah pelayanan, maka baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, maupun pemerintahan desa adalah berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari masyarakat setempat. Berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melakukan berbagai upaya melalui program pemberian bantuan sosial salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) masuk di Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2014 sebagai bentuk upaya penanggulangan kemiskinan. Program ini telah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun dalam rangka menanggulangi, mengurangi, dan memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur. Akan tetapi, hingga saat ini kategori kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur masih cukup tinggi, masih terdapat angka putus sekolah, dan masih terdapat masyarakat yang masuk dalam tingkat kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan fenomena tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan tentang pelaksanaan program ini, yaitu apakah program ini telah tepat sasaran atau masih terdapat kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan identifikasi terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan untuk menilai dampak jangka panjang program ini terhadap penerima manfaat dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara.

**1.3 Penelitian Terdahulu**

Pada penyusunan penelitian ini, terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang dijadikan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terkait Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan dijadikan bahan referensi untuk dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis menggunakan 5 (lima) penelitian terdahulu sebagai pedoman dalam mengkaji efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penelitian oleh Sedy Septian Aziz (2022), yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Subang“, menunjukkan bahwa PKH di Desa Pamanukan Hilir telah berjalan secara efektif yang diukur dari 4 (empat) indikator, yaitu

kesadaran pendidikan, kesadaran kesehatan, turunnya beban pengeluaran, kemudahan akses kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan pendapatan.

Penelitian oleh Suyanti (2022) yang berjudul "Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya penanggulangan kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)" menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Basuki sudah berjalan secara efektif yang diukur melalui 4 (empat) indikator, diantaranya yaitu, pengetahuan atau sosialisasi program, ketepatan sasaran program, pemantauan program, dan ketepatan tujuan program.

Penelitian oleh Sofianto (2020) berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan di Provinsi Jawa Tengah" menunjukkan implementasi PKH dilihat dari aspek prosedur dan manajerial sudah dianggap baik, namun sasaran program kurang tepat karena data tidak valid, serta dibutuhkan pembaharuan berdasarkan dimensi keberlanjutan.

Penelitian oleh Arafat (2020) yang berjudul "Pengentasan Kemiskinan Melalui Program PKH di Kabupaten Kolaka Timur (Studi di Kelurahan Atula)" berdasarkan 3 indikator menunjukkan bahwa organisasi PKH di Kabupaten Kolaka Timur sudah terbentuk dengan baik ditingkat kecamatan, maupun tingkat kabupaten, interpretasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kolaka Timur, khususnya di Kelurahan Atula telah mengacu pada SOP yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial, dan aplikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH Kelurahan Atula belum berjalan dengan maksimal.

Penelitian oleh Samian (2024) tentang "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban" menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini sejalan dengan rancangan dan tahapan desain yang telah ditetapkan, namun masih dihadapkan pada beberapa kendala konvensional baik dari struktur pemerintahan maupun dari para penerima bantuan itu sendiri.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu untuk meneliti Program Keluarga Harapan (PKH) dimana teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori efektivitas menurut Aswar Annas (2017) menggunakan 7 (tujuh) dimensi yaitu ketepatan waktu, sumber daya manusia pengelola program, mekanisme kerja, kerjasama dan komunikasi, ketepatan penyaluran dana, analisis penyimpanan, serta monitoring dan evaluasi.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari wilayah atau lokasi yang diteliti yang dianggap sesuai untuk dapat melihat langsung fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan dalam menilai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan selama 21 hari di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap 15 orang informan berdasarkan tugas pokok, dan fungsinya pada instansi terkait yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan, serta partisipasi masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan program. Informan tersebut

terdiri dari informan kunci yang memiliki pengetahuan tentang kebijakan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan informan utama yang terlibat secara langsung dalam interaksi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Informan kunci terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur, dan informan utama terdiri dari Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Kolaka Timur, serta perwakilan penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kolaka Timur. Observasi yang dilakukan adalah observasi secara tidak langsung melalui data dan informasi yang diperoleh dari pihak yang terlibat dalam program dengan mengamati pelaksanaan dan pendampingan Program Keluarga Harapan, serta kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi penerima manfaat PKH di Kabupaten Kolaka Timur. Dari data tersebut kemudian dilakukan triangulasi data untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diukur menggunakan teori efektivitas menurut Aswar Annas (2017) yang dibahas pada sub bab berikut.

#### **3.1 Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur**

Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur telah efektif yang diukur berdasarkan 7 (tujuh) indikator efektivitas menurut Aswar Annas (2017), dimana 6 (enam) indikator yang sudah baik, dan satu indikator masih belum optimal. Enam indikator yang sudah baik terdiri dari sumber daya manusia pengelola program, mekanisme kerja, kerjasama dan komunikasi, ketepatan penyaluran dana, analisis penyimpangan, serta monitoring dan evaluasi, dan satu indikator yang belum optimal yaitu indikator ketepatan waktu.

##### **3.1.1 Ketepatan Waktu**

Berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang penulis lakukan mengenai dimensi ketepatan waktu dengan indikator ketepatan waktu penyelenggaraan program, dan kepekaan terhadap penyimpangan dinilai belum efektif dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur. Hal ini disebabkan karena ketidakpastian waktu penyaluran dana dari pusat yang dirasakan oleh KPM menjadi kendala dalam pemanfaatan bantuan, serta belum adanya saluran pengaduan yang lebih efektif untuk menjamin kerahasiaan, keamanan dan kenyamanan bagi pelapor.

##### **3.1.2 Sumber Daya Manusia Pengelola Program**

Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi berdasarkan dimensi Sumber Daya Manusia Pengelola Program PKH di Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan aspek yang positif baik dalam ketepatan pemilihan SDM melalui seleksi dan pelatihan terpusat, maupun dalam pengambilan tindakan yang benar melalui koordinasi dengan Dinas Sosial dan berpedoman pada aturan yang berlaku. Struktur organisasi dengan adanya koordinator kabupaten dan pendamping kecamatan yang terdistribusi juga mendukung efektivitas program.

### **3.1.3 Mekanisme Kerja**

Dimensi mekanisme kerja Program PKH di Kabupaten Kolaka Timur hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa menunjukkan strategi pelaksanaan yang terencana dengan baik, meliputi penetapan sasaran, penguatan pendampingan, sinergi program, evaluasi yang terukur, serta penentuan titik strategis program yang baik dengan mempertimbangkan prioritas utama pada wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketersediaan fasilitas pendukung. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan program dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3.1.4 Kerjasama dan Komunikasi**

Dimensi kerjasama dan komunikasi berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Kolaka Timur dengan indikator pengkomunikasian masalah program, koordinasi pelaksanaan program, serta pengantisipasi kendala yang dihadapi menunjukkan tingkat interaksi dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Pengkomunikasian masalah program berjalan efektif melalui forum pertemuan dan alur koordinasi yang jelas, koordinasi penyelenggaraan program dilakukan secara rutin melalui sosialisasi dan pertemuan berkala, serta upaya pengantisipasi kendala juga terstruktur dengan adanya prosedur penanganan gangguan dan pelaporan masalah menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga kelancaran dan efektivitas program melalui komunikasi dan kerjasama.

### **4.1.5 Ketepatan Penyaluran Dana**

Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang dimensi ketepatan penyaluran dana PKH di Kabupaten Kolaka Timur dinilai cukup efektif berdasarkan indikator pembiayaan program, pengendalian dana, dan pemberian dana sesuai kebutuhan. Dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan, PKH juga memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, serta mendukung upaya pencegahan stunting. Mekanisme pengendalian dana juga menunjukkan adanya upaya untuk memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran.

### **4.1.6 Analisis Penyimpangan**

Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pada dimensi analisis penyimpangan dapat disimpulkan bahwa PKH di Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan efektivitas yang cukup baik berdasarkan indikator ketepatan sasaran program, pemanfaatan program. Indikator ketepatan sasaran dengan Program PKH menunjukkan upaya yang baik dalam menargetkan masyarakat miskin yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Program), indikator pemanfaatan program yang diobservasi melalui dampak bantuan dan pendampingan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) memberikan dampak yang cukup baik kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH.

### **3.1.7 Monitoring dan Evaluasi**

Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai dimensi monitoring dan evaluasi berdasarkan indikator pemberian petunjuk kelanjutan program, pengawasan program, serta penilaian pelaksanaan program dianggap cukup efektif. Pemberian petunjuk kelanjutan program dilakukan melalui sosialisasi dan Pendampingan kepada KPM, pengawasan pada

tingkat Kabupaten Kolaka Timur dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur, serta penilaian program berdasarkan adanya graduasi mandiri membuktikan bahwa program PKH telah membantu masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kolaka Timur untuk meningkatkan kesejahteraan dan mandiri secara ekonomi.

### 3.1 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan PKH di Kabupaten Kolaka Timur

#### 3.2.1 Faktor Pendukung

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kolaka Timur sebagai bantuan sosial bersyarat secara berkelanjutan sangat bergantung pada faktor pendukung kelancaran program. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, pelaksanaan PKH di Kabupaten memiliki beberapa faktor pendukung, diantaranya yaitu:

1. Pendamping PKH yang Kompeten

Pendamping PKH di Kabupaten Kolaka Timur memiliki kompetensi yang cukup baik untuk memberikan pendampingan kepada KPM dalam memenuhi kewajiban, memberikan motivasi dan edukasi untuk meningkatkan kualitas hidup, serta memastikan bantuan PKH tepat sasaran dengan melakukan pendataan dan memverifikasi kondisi KPM secara berkala.

2. Koordinasi Penyelenggaraan Program yang Baik

Pendamping PKH Kabupaten Kolaka Timur melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, musyawarah kelompok, dan pertemuan rutin PKH untuk memberikan masukan dan saran dari penerima manfaat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas program. Dengan adanya koordinasi yang baik memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan mekanisme program.

3. Pemberian Intensif Bagi Penerima PKH yang melakukan Graduasi Mandiri

Graduasi mandiri berarti keluarga penerima manfaat (KPM) secara sukarela memutuskan untuk keluar dari program karena merasa kondisinya telah membaik dan mampu mandiri. Saat ini berdasarkan laporan dari Pendamping PKH, sudah ada beberapa penerima PKH yang mengundurkan diri sebagai penerima PKH dikarenakan mereka merasa sudah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

**Tabel 2**  
**Jumlah Graduasi Mandiri di Kabupaten Kolaka Timur**  
**Tahun 2014-2023**

No	Kecamatan	Tahun										Total
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Aere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Lambangia	2	-	-	-	3	-	-	-	3	-	8
3.	Poli-Polia	1	-	1	2	2	1	-	-	-	-	7
4.	Dangia	2	1	-	-	4	-	-	-	-	1	8
5.	Ladongi	1	-	-	-	2	-	-	3	-	-	6
6.	Loea	-	-	1	1	9	-	-	-	-	-	11
7.	Tirawuta	8	-	2	-	8	-	1	2	-	-	21
8.	Lalolae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	Tahun										Total
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
9.	Mowewe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Tinondo	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3
11.	Uluiwoi	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	4
12.	Ueesi	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>70</b>

Sumber : Data Graduasi Mandiri oleh Pendamping PKH Kabupaten Kolaka Timur

### 3.2.2 Faktor Penghambat

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, pelaksanaan PKH di Kabupaten memiliki beberapa faktor penghambat, diantaranya yaitu:

#### 1. Ketidaktepatan Sasaran PKH

Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu hambatan utama yang dapat mengurangi efektivitas program ini. Masalah ini muncul ketika bantuan PKH diberikan kepada keluarga yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat, atau sebaliknya, ketika keluarga yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan. Ketidaktepatan sasaran ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain Kualitas data yang kurang akurat, Kurangnya verifikasi dan validasi data, faktor subjektivitas, kurangnya pengawasan, serta perubahan kondisi ekonomi sehingga data menjadi tidak relevan.

#### 2. Ketidakpastian Waktu Penyaluran Dana dari Pusat

Masalah ini muncul ketika jadwal penyaluran dana tidak konsisten atau tidak dapat diprediksi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakpastian waktu penyaluran dana tersebut antara lain disebabkan oleh Masalah teknis dalam sistem transfer dana, kendala administrasi di tingkat pusat, Proses administrasi yang rumit atau lambat di tingkat pusat dapat menyebabkan penundaan penyaluran dana, perubahan kebijakan atau anggaran.

#### 3. Ketergantungan Masyarakat terhadap Bantuan Sosial

Ketergantungan terhadap bantuan sosial mengacu pada kondisi di mana individu atau keluarga menjadi sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah atau lembaga lain untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kondisi ini dapat menghambat upaya mereka untuk menjadi mandiri dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Faktor-faktor penyebab ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, diantaranya yaitu kemiskinan struktural, budaya ketergantungan, serta bencana alam dan bencana sosial yang bisa menyebabkan kemiskinan.

### 3.3 Upaya untuk Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan PKH di Kabupaten Kolaka Timur

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan PKH di Kabupaten Kolaka Timur meliputi peningkatan akurasi data dan validasi penerima manfaat, perbaikan sistem penyaluran dana yang lebih efisien dan tepat waktu, penguatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat penerima manfaat, serta pengawasan dan penanganan pengaduan yang transparan dan akuntabel. Validasi data dilakukan dengan mendata masyarakat miskin dalam DTKS kemudian

dikelompokkan berdasarkan tingkat kemiskinannya, setelah itu dilakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan hak untuk menerima bantuan. Untuk membantu kelancaran waktu penyaluran PKH, Selain memberikan edukasi kepada penerima PKH, Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur juga berupaya untuk melakukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Sosial, pihak perbankan, dan pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran proses penyaluran, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat. Untuk Ketergantungan terhadap bantuan sosial khususnya bantuan PKH melalui pemberian edukasi kepada penerima PKH melalui P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) dan program graduasi mandiri bagi penerima PKH.

### **3.4 Temuan Utama Penelitian**

Penelitian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini telah efektif dalam membantu mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi pelaksanaan program ini terdapat kendala dalam ketepatan waktu penyaluran, dan ketidaktepatan sasaran program. Ketidaktepatan waktu penyaluran didukung dengan temuan oleh Arafat (2020) yang menjelaskan bahwa dalam tahapan pencairan Program Keluarga Harapan seringkali tidak sesuai jadwal yang diberikan kepada pendamping, sehingga pendamping tidak bisa menginformasikan secara pasti kepada peserta Program Keluarga Harapan kapan pencairan akan dilakukan. Ketidaktepatan sasaran program juga ditemukan pada penelitian oleh Arif Sofianto (2020) yang menjelaskan bahwa sasaran program kurang tepat dikarenakan data yang tidak valid, serta dibutuhkan pembaharuan berdasarkan dimensi keberlanjutan. Secara keseluruhan, Program Keluarga Harapan ini menunjukkan pelaksanaan yang baik di Kabupaten Kolaka Timur memberikan perubahan kepada penerima manfaat PKH, baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Hal ini selaras dengan penelitian oleh Suyanti (2022) yang menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan ini membuat KPM (Keluarga Penerima Manfaat) lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan, serta dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga yang dibuktikan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan kualitas kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar bagi anak, mengurangi beban pengeluaran dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur telah berjalan efektif yang dorong dengan adanya pendamping PKH yang kompeten, koordinasi penyelenggaraan program yang baik, serta pemberian intensif bagi penerima PKH yang melakukan graduasi mandiri. Namun, pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini masih terdapat hambatan diantaranya yaitu, ketidaktepatan sasaran program, ketidakpastian waktu penyaluran dana dari pusat, serta ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur melakukan upaya yaitu meliputi pemuktahiran DTKS (Data terpadu Kesejahteraan Sosial) secara berkala melalui verifikasi dan validasi data yang lebih ketat, peningkatan koordinasi antar instansi yaitu Kementerian Sosial, pihak perbankan, dan pemerintah daerah, dan pemberian edukasi kepada penerima PKH melalui Program P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) serta menarik minat penerima PKH untuk melakukan graduasi mandiri.

**Keterbatasan Penelitian :** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan :** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Program Keluarga Harapan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, koordinator pendamping PKH kabupaten dan pendamping PKH Kabupaten Kolaka Timur, masyarakat, serta seluruh pihak yang telah membantu dan menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, R. H. (2020). Pengentasan Kemiskinan Melalui Program PKH Di Kabupaten Kolaka Timur (Studi Di Kelurahan Atula). *Junal of Public Administration and Government*, 2.
- Aswar Annas. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*. Celebes media perkasa.
- Azariadis, C., & Stachurski, J. (n.d.). *Department Of Economics Poverty Traps*.
- Diana Meilinda, S., & Cahyani, I. (n.d.). *Covid-19: Struktur Masalah dan Pendekatan Kebijakan*. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
- Fernandes Simangunsong. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan : Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Alfabeta
- Loayza, N., & Raddatz, C. (2006). *The Composition Of Growth Matters For Poverty Alleviation \* The Composition Of Growth Matters For Poverty Alleviation*. <https://econ.worldbank.org>.
- Moatsos, M., & Lazopoulos, A. (2021). Global poverty: A first estimation of its uncertainty. *World Development Perspectives*, 22. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100315>
- Muhadam Labolo. (2017). *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Edisi Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Purwono, R., Wardana, W. W., Haryanto, T., & Khoerul Mubin, M. (2021). Poverty dynamics in Indonesia: empirical evidence from three main approaches. *World Development Perspectives*, 23. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100346>
- Rukiko, M. D., Mwakalobo, A. B. S., & Mmasa, J. J. (2023). The impact of Conditional Cash Transfer program on stunting in under five year's poor children. *Public Health in Practice*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.puhip.2023.100437>
- Samian, S., Muchsin, S., & Afiffuddin, A. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 9(2), 340–351. <https://doi.org/10.28926/briliant.v9i2.1921>

Sendy Septian Aziz. (2022). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Subang*.

Singh, P. K., & Chudasama, H. (2020). *Evaluating poverty alleviation strategies in a developing country*. PLoS ONE, 15(1). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227176>

Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>

Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. UPP AMP YKPN.

Suyanti. (2022). *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya penanggulangan kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)*.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

